BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Persediaan

Persediaan merupakan elemen yang penting bagi keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan baik perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Perbedaan utama perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur adalah dalam perusahaan dagang yang akan dijual berasal dari pembelian barang yang telah siap untuk dijual kembali tanpa melalui proses produksi, sedangkan dalam perusahaan manufaktur tidak membeli barang dalam keadaan siap jual tetapi diolah dari bahan baku untuk diproses kembali menjadi barang jadi yang kemudian dijual sebagai barang dagangan.

2.1.1 Pengertian Persediaan

Persediaan merupakan suatu aktiva yang besar nilainya dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu persediaan harus dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga persediaan sangat mempengaruhi kesinambungan operasi perusahaan dan posisi keuangan perusahaan.

Menurut Henry Simamora dalam bukunya Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis Pencatatan:

> **"Persediaan adalah aktiva yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang tersedia untuk di jual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi atau dalam perjalanan dan dalam bentuk bahan baku atau keperluan untuk dipakai dalam proses produksi atau penyerahan jasa".**
>
> **(2000 : 266)**

Sedangkan menurut Freddy Rangkuti dalam buku Manajemen Persediaan:

> **"Persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan/proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi".**
>
> **(2004 : 1)**

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia melalui Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menyatakan:

> **"Persediaan adalah aktiva:**
> **a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal**
> **b. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalana; atau**
> **c. Dalam bentuk badan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses pemberian jasa".**
>
> **(2004 : 12)**

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa persediaan merupakan suatu harta atau aktiva milik perusahaan yang terdiri dari persediaaan bahan baku, masih dalam proses produksi maupun barang-barang perusahaan yang siap untuk dijual.

2.1.2 Fungsi Persediaan

Persediaan sebagai bagian utama dalam menjalankan kegiatan perusahaan memiliki fungsi yang mendukung aktivitas perusahaan tersebut.

Menurut Freddy Rangkuti dalam buku Manajemen Persediaan:

"Fungsi dari persediaan antara lain:
1. **Menghilangkan risiko keterlambatan datangnya barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan**
2. **Menghilangkan risiko barang yang rusak**
3. **Mempertahankan stabilitas operasi perusahaan atau menjamin kelancaran arus produksi**
4. **Mencapai penggunaan mesin yang optimal**
5. **Memberikan pelayanan yag sebaik-baiknya bagi konsumen".**

(2004 : 7)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi diadakannya persediaan adalah untuk mengantisipasi risiko keterlambatan datangnya barang, sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen dan untuk mengantisipasi risiko hilangnya barang, karena dengan diadakannya persediaan ini perusahaan dapat mengecek keadaan barang dagangan yang dimilikinya.

2.1.3 Klasifikasi Persediaan

Persediaan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, tergantung pada jenis kegiatan perusahaan, perusahaan itu merupakan perusahaan dagang (*merchandiser*) atau perusahaan industri (*manufacture*).

Menurut Henry Simamora dalam buku Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis Pencatatan:

"Pengklasifikasian persediaan adalah sebagai berikut:
1. **Dalam perusahaan dagang (*merchandiser*) yaitu persediaan barang dagangan, dimana persediaan tersebut adalah barang**

yang siap untuk dijual kepada pelanggan dalam satu kegiatan normal perusahaan.

2. **Dalam perusahaan industri (*manufacture*) persediaan biasanya diklasifikasikan dalam tiga (3) kategori yaitu:**
   a. **Persediaan bahan baku (*raw material*), meliputi barang-barang berwujud yang diperoleh untuk penggunaan langsung dalam proses produksi.**
   b. **Persediaan barang dalam proses (*goods in process inventory*), meliputi produk-produk yang telah mulai dimasukkan dalam proses produksi, namun belum selesai diolah. Persediaan barang setengah jadi ini meliputi tiga komponen biaya:**
      1. **Bahan baku**
      2. **Tenaga kerja langsung, yang merupakan biaya tenaga kerja yang dipakai dalam mengolah produk**
      3. **Overhead pabrikasi, yang merupakan biaya-biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung**
   c. **Persediaan barang jadi (*finished goods inventory*), meliputi produk-produk olahan yang siap untuk dijual kepada para pelanggan."**

(2000 : 266)

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengklasifikasian persediaan, diklasifikasikan berdasarkan jenis usaha perusahaan sebagai berikut: Pada perusahaan dagang hanya terdapat persediaan barang dagangan dan pada perusahaan industri terdapat tiga (3) jenis persediaan, diantaranya persediaaan bahan baku, persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi.

2.1.4 Sifat Persediaan

Persediaan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. Biasanya merupakan aktiva lancar (*current assets*) karena masa perputarannya biasanya kurang atau sama dengan satu tahun.
2. Merupakan jumlah yang besar, terutama dalam perusahaan dagang dan industri.

3. Mempunyai pengaruh yang besar terhadap neraca dan perhitungan laba rugi, karena kesalahan dalam menentukan persediaan pada akhir periode akan mengakibatkan kesalahan dalam jumlah aktiva lancar dan total aktiva, harga pokok penjualan, laba kotor dan laba bersih, taksiran pajak penghasilan, pembagian deviden dan laba rugi ditahan, kesalahan tersebut akan terbawa ke laporan keuangan periode berikutnya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa persediaan mempunyai sifat-sifat: persediaan merupakan aktiva lancar, merupakan jumlah yang besar dan sebagai aktiva lancar yang keberadaannya dapat mempengaruhi laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi.

2.1.5 Sistem Pencatatan Persediaan

Dalam mencatat transaksi-transaksi yang mempengaruhi besarnya persediaan barang dagangan, setiap perusahaan akan melakukan pencatatan persediaan barang dagangan dengan menggunakan sistem yang sesuai dengan jenis persediaan barang dagangan perusahaan tersebut.

Menurut C. Rollin Niswonger dalam buku Prinsip-prinsip Akuntansi yang diterjemahkan oleh Alfonsus Sirait menyatakan:

> **"Terdapat dua sistem persediaan (*inventory system*) yang utama yaitu sebagai berikut:**
> 1. **Sistem Persediaan Periodik/Metode Fisik, dalam sistem persediaan periodik/metode fisik, pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi melalui ayat jurnal penyesuaian. Semua pembelian barang dagangan dicatat pada rekening pembelian dan penjualan, maka keluar masuknya barang tidak dapat diketahui secara langsung sehingga untuk menghitung nilai persediaan barang dagangan dilakukan pada akhir periode secara fisik. Persediaan barang dagangan yang**

dilaporkan dalam laporan keuangan tercatat nilai persediaan barang dagangan akhir.

2. **Sistem Persediaan Perpetual/Metode Buku, dalam sistem persediaan perpetual/metode buku, pencatatan dilakukan setiap terjadi transaksi yang dipengaruhi nilai persediaan setiap saat. Untuk transaksi pembelian barang dagangan pada rekening persediaan disebelah debit, sedangkan penjualan barang dagangan dicatat pada rekening persediaan disebelah kredit. Selain itu dibantu dengan buku pembantu persediaan barang dagangan dengan membuat kartu barang sehingga nilai persediaan dapat diketahui setiap saat".**

(2000 : 392)

Sedangkan menurut Henry Simamora dalam buku Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis Pencatatan:

> **"Terdapat dua sistem untuk akuntansi persediaan barang dagangan: sistem persediaan periodik dan sistem persediaan perpetual, dimana dalam sistem persediaan periodik, tidak dilakukan upaya untuk membuat catatan-catatan persediaan yang rinci dari jumlah barang dagangan yang ada di gudang sepanjang periode akuntansi. Sedangkan dalam sistem persediaan perpetual, dibuat catatan-catatan perihal kuantitas dan biaya perolehan masing-masing jenis persediaan pada saat barang dagangan tersebut dibeli atau dijual".**
>
> **(2000 : 141)**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa antara sistem periodik dan perpetual memiliki perbedaan. Dalam sistem periodik yang dicatat hanya pada transaksi pembelian saja, sehingga untuk mengetahui nilai persediaan barang dagangan harus melakukan perhitungan fisik. Sedangkan dalam sistem perpetual pencatatan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi nilai persediaan.

Untuk penjurnalan antara sistem periodik dengan sistem perpetual digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Jurnal untuk sistem pencatatan persediaan barang dagangan

NO	TRANSAKSI	METODE FISIK	METODE PERPETUAL
1	*Purchases*	*Purchases* *Account Payable/Cash*	*Merchandise Inventory* *Account Payable/Cash*
2	*Purchases Return*	*Account Payable/Cash* *Purchases Return*	*Account Payable/Cash* *Merchandise Inventory*
3	*Sales*	*Acc. Receivable/Cash* *Sales*	*Acc. Receivable/Cash* *Sales* *Cost Of Goods Sold* *Merchandise Inventory*
4	*Sales Return*	*Sales Return* *Acc. Receivable/Cash*	*Sales Return* *Acc. Receivable/Cash* *Merchandise Inventory* *Cost Of Goods Sold*

2.1.6 Metode Penilaian Persediaan

Persediaan barang dagangan bisa dihitung dengan menggunakan beberapa metode penilaian persediaan diantaranya adalah Metode FIFO (*First In First Out*), Metode LIFO (*Last In First Out*), Metode Rata-Rata (*Average*).

Penilaian menurut C. Rollin Niswonger dalam bukunya Prinsip-prinsip Akuntansi yang diterjemahkan oleh Alfonsus Sirait menyatakan:

> **"Jika harga pasar suatu persediaan lebih rendah dari pada harga pokoknya, alternatif lain dalam menilai suatu persediaan harga pokok adalah menggunakan metode mana yang lebih rendah antara harga pokok dengan harga pasar".**
>
> **(2000 : 400)**

Menurut Joel dan Jae yang diterjemahkan oleh Kurdi dalam Kamus Istilah Akuntansi:

> **"Penilaian Persediaan (*inventory valuation*) merupakan pencatatan biaya yang diperuntukkan bagi persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi dan barang persediaan lainnya".**
>
> **(2005 : 251)**

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa metode penilaian persediaan adalah suatu cara yang digunakan dalam menentukan nilai persediaan barang dagangan dalam suatu perusahaan.

Menurut Freddy Rangkuti dalam bukunya Manajemen Persediaan:

> **"Penentuan harga pokok persediaan sangat tergantung dari metode penilaian yang dipakai, yaitu metode FIFO, metode LIFO atau metode harga pokok rata-rata".**
>
> **(2004 : 116)**

Menurut Carl S. Warren, James M. Reeve dan Philip E. Fess dalam bukunya Pengantar Akuntansi Edisi 21 yang diterjemahkan oleh Aria Farahmita, Amanugrahani dan Taufik Hendrawan menyatakan:

> **"Ada tiga asumsi arus biaya yang umum dalam bisnis adalah:**
> **1. FIFO**
> **2. LIFO**
> **3. AVERAGE**
> **Setiap metode biasanya menghasilkan jumlah harga pokok penjualan dan persediaan akhir barang dagangan yang berbeda. Jadi, pemilihan asumsi arus biaya secara langsung mempengaruhi laporan laba rugi dan neraca".**
>
> **(2005 : 476)**

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa dalam penilaian persediaan terdapat tiga metode yang sering digunakan, diantaranya adalah Metode FIFO, Metode LIFO dan Metode Rata-rata.

2.1.7 Metode FIFO (*first in first out*)

Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama) adalah salah satu metode penilaian persediaan dimana menganggap barang-barang yang pertama dibeli (masuk) merupakan yang pertama kali dijual (keluar).

Menurut Henry Simamora dalam bukunya Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis Pencatatan:

> **"Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang dalam persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu sehingga yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi belakangan/kemudian".**
>
> **(2000 : 274)**

Sedangkan menurut Soemarso dalam bukunya Akuntansi Suatu Pengantar:

> **"FIFO adalah metode penetapan harga pokok persediaan yang didasarkan atas anggapan bahwa barang-barang terdahulu dibeli akan merupakan barang yang dijual pertama kali. Dalam metode ini persediaan akhir dinilai dengan harga pokok pembelian yang paling akhir".**
>
> **(2000 : 394)**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam metode FIFO, barang yang masuk pertama adalah barang yang pertama keluar atau dijual, sehingga persediaan barang pada akhir periode adalah barang-barang yang masuknya paling akhir.

Misalkan data persediaan yang ada pada PT ABC mengenai barang dagangan berupa komputer selama bulan April 2006 sebagai berikut:

April 1 Persediaan 4 buah @ Rp 2.000.000 = Rp 8.000.000

April 9 Pembelian 3 buah @ Rp 2.100.000 = Rp 6.300.000

April 15 Penjualan 4 buah @ Rp 2.500.000 = Rp 10.000.000

April 23 Penjualan 1 buah @ Rp 2.500.000 = Rp 2.500.000

April 28 Pembelian 2 buah @ Rp 2.050.000 = Rp 4.100.000

Hitung jumlah persediaan akhir barang dagangan PT ABC dengan menggunakan metode FIFO dengan sistem persediaan perpetual!

Jawab:

Tabel 2.2
Metode FIFO dengan sistem persediaan perpetual
(dalam ribuan rupiah)

Tanggal	Pembelian			Penjualan			Persediaan		
	Unit	Harga	Total	Unit	Harga	Total	Unit	Harga	Total
1/4							4	2000	8000
9/4	3	2100	6300				4	2000	8000
							3	2100	6300
15/4				4	2000	8000	3	2100	6300
23/4				1	2100	2100	2	2100	4200
28/4	2	2050	4100				2	2100	4200
							2	2050	4100
							4		8300

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa sisa persediaan barang dagangan komputer pada PT ABC sebanyak 4 unit dan nilai persediaan akhir Rp 8.300.000,00

2.1.8 Metode LIFO *(last in first out)*

Metode LIFO atau MTKP (masuk terakhir keluar pertama) adalah salah satu metode penilaian persediaan dimana menganggap barang-barang yang terakhir dibeli (masuk) merupakan barang yang pertama dijual (keluar).

Menurut Henry Simamora dalam bukunya Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis Pencatatan:

> **"Metode LIFO mengasumsikan bahwa barang dagangan yang dibeli atau diproduksi terakhir akan dijual atau digunakan terlebih dahulu sehingga yang termasuk dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi terdahulu".**
>
> **(2000 : 275)**

Sedangkan menurut Soemarso dalam bukunya Akuntansi Suatu Pengantar:

> **"LIFO adalah metode penetapan harga pokok persediaan yang didasarkan atas anggapan bahwa barang-barang yang paling akhir dibeli akan merupakan barang yang dijual pertama kali. Dalam metode ini, persediaan akhir akan dinilai dengan harga pembelian yang terdahulu".**
>
> **(2000 : 39)**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam metode LIFO, barang yang terakhir masuk adalah barang yang pertama keluar atau dijual, sehingga persediaan pada akhir periode adalah barang-barang yang masuknya paling awal.

Berikut menggunakan metode LIFO (*last in first out*) yang diambil dari data sebelumnya.

Tabel 2.3
Metode LIFO dengan sistem pencatatan persediaan perpetual
(dalam ribuan rupiah)

Tanggal	Pembelian			Penjualan			Persediaan		
	Unit	Harga	Total	Unit	Harga	Total	Unit	Harga	Total
1/4							4	2000	8000
9/4	3	2100	6300				4 3	2000 2100	8000 6300
15/4				3 1	2100 2000	6300 2000	3	2000	6000
23/4				1	2000	2000	2	2000	4000
28/4	2	2050	4100				2 2	2000 2050	4000 4100
							4		8100

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa sisa persediaan barang dagangan komputer pada PT ABC sebanyak 4 unit dan nilai persediaan akhir Rp 8.100.000,00

2.1.9 Metode Rata-Rata (*average*)

Metode rata-rata mengasumsikan bahwa barang yang tersedia untuk dijual adalah sama dan pengalokasiannya berdasarkan harga perolehan rata-rata.

Menurut Soemarso dalam bukunya Akuntansi Suatu Pengantar:

> **"*Average* adalah metode penetapan harga pokok persediaan dimana dianggap bahwa harga pokok rata-rata dari barang yang tersedia dijual akan digunakan untuk menilai harga pokok yang dijual dan yang erdapat dalam persediaan".**
> **Adapun rumus rata-rata per unit = $\frac{\sum \text{(unit x harga)}}{\sum \text{unit}}$**
>
> **(2000 : 395)**

Sedangkan menurut Carl S. Warren, James M. Reeve dan Philip E. Fess dalam bukunya Pengantar Akuntansi Edisi 21 yang diterjemahkan oleh Aria Farahmita, Amanugrahani dan Taufik Hendrawan menyatakan:

> **"Jika menggunakan metode biaya rata-rata (*average cost method*) maka biaya unit dalam persediaan adalah rata-rata dari biaya pembelian".**
>
> **(2005 : 457)**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam metode rata-rata, untuk menentukan nilai persediaan akhir barang yaitu dengan cara mengalikan jumlah unit dengan harga rata-rata perunitnya dan untuk menentukan harga rata-rata perunitnya digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata per unit} = \frac{\sum (\text{unit x harga})}{\sum \text{unit}}$$

Berikut menggunakan metode rata-rata (*average*) yang diambil dari data sebelumnya.

Tabel 2.4
Metode *Average* dengan sistem pencatatan persediaan perpetual
(dalam ribuan rupiah)

Tanggal	Pembelian			Penjualan			Persediaan		
	Unit	Harga	Total	Unit	Harga	Total	Unit	Harga	Total
1/4							4	2000	8000
9/4	3	2100	6300				7	2043	14300
15/4				4	2043	8172	3	2043	6129
23/4				1	2043	2043	2	2043	4086
28/4	2	2050	4100				4	2047	8186

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa sisa persediaan barang dagangan komputer pada PT ABC sebanyak 4 unit dan nilai persediaan akhir Rp 8.186.000,00

2.2 Koperasi

Koperasi sebagai badan usaha dengan tujuan untuk memajukan kepentingan ekonomi anggotanya mempunyai latar belakang yang berbeda dengan badan usaha yang lain. Pada hakekatnya koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk diperhatikan, koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Dasar kegiatan koperasi adalah kerjasama yang dianggap sebagai suatu cara untuk memecahkan berbagai masalah atau persoalan yang mereka hadapi masing-masing. Koperasi menduduki tempat yang penting dalam sistem perekonomian disamping sektor-sektor perekonomian lainnya .

2.2.1 Pengertian Koperasi

Pengertian Koperasi menurut Nindyo Pramono yang dikutip oleh R. Sutanta Rahardja Hadikusuma dalam bukunya Hukum Koperasi Indonesia:

> **"Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya".**
>
> **(2001 : 1)**

Pengertian atau definisi diatas tentang perkoperasian di Indonesia mengalami perkembangan atau perubahan disatu Undang-Undang Koperasi ke Undang-Undang Koperasi berikutnya. Adapun pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992, Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan

Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan bahwa:

> **"Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan".**
>
> **(2002 : 17)**

Dari Kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Koperasi sebagai suatu organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan.
2. Koperasi merupakan badan usaha yang mempunyai tujuan mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.
3. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

2.2.2 Ciri-Ciri Koperasi

Berdasarkan pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Koperasi Indonesia memiliki ciri-ciri yaitu:

1. Koperasi adalah badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis.
2. Tujuan harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya pada anggota.

3. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka serta tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, yang berarti tidak ada pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
4. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
5. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan bardasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggotanya adalah terbatas artinya tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar dan tidak berdasarkan atas besarnya modal yang diberikan.
6. Koperasi berprinsip mandiri, ini mengandung arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain.

2.2.3 Landasan dan Tujuan Koperasi

Pada Pasal (2) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa:

> **"Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas azas kekeluargaan".**

Sedangkan pada pasal (3) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Tujuan Koperasi Indonesia seperti berikiut:

> **"Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dalam masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka memajukan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945".**

Sedangkan tujuan Koperasi dari segi kepentingan anggota:

1. Tujuan Koperasi ditinjau dari segi kepentingan anggota:
    a. Pemberian jasa atau pelayanan yang bermanfaat bagi anggota
    b. Peningkatan taraf hidup anggota
    c. Peningkatan penididikan moril anggota koperasi
2. Tujuan Koperasi ditinjau dari segi kepentingan masyarakat:
    a. Mengembalikan kepercayaan masyarakat akan manfaat koperasi
    b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan berkoperasi
    c. Meningkatkan warga masyarakat ekonomilemah dalam wadah koperasi
    d. Menciptakan dan memperluas lapangan kerja
    e. Membantu pelayanan dan penyediaan kebutuhan-kebutuhan anggota masyarakat
    f. Membantu usaha-usaha sosial dalam masyarakat sesuai Pasal 34 Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok Perkoperasian
    g. Meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan warga masyarakat
3. Tujuan Koperasi ditinjau dari segi kepentingan pemerintah:
    a. Melaksanakan Undang-Undang dasar 1945 pasal 33 Ayat 1 (Koperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi)
    b. Membantu dan menunjang program pemerintah dalam pembangunan
    c. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
    d. Partner pemerintah yang bergerak dibidang perekonomian Indonesia

Sedangkan landasan Koperasi itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Landasan Idiil

   Landasan Idiil adalah Pancasila yaitu kelima sila dari Pancasila yaitu sila KeTuhanan, Kemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakyatan dan keadilan harus dijadikan dasar untuk dilaksanakan dalam kehidupan koperasi, karena sila-sila tersebut menjadi sifat dan tujuan koperasi setelah serta selamanya merupakan aspirasi anggota koperasi.

2. Landasan Struktural dan Landasan Gerak

   Landasan struktural adalah Undang-undang dasar 1945 dan landasan geraknya adalah Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.

3. Landasan Operasional

   Landasan Operasional Koperasi adalah GBHN yang merupakan pernyataan kehendak rakyat tentang pokok umum pembayaran nasional yang akan memberikan arah perjuangan negara dan rakyat Indonesia.

4. Landasan Mental

   Landasan Mental Koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi dalam koperasi harus bergabung kedua landasan mental tadi sebagai kedua unsur yang dorong mendorong, hidup menghidupi dan awas mengawasi.

2.2.4 Fungsi dan Peran Koperasi

Dalam Undang-undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992, bab III, bagian pertama, Pasal 4, tentang Fungsi dan Peran Koperasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.2.5 Prinsip Koperasi

Berdasarkan Undang-undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992, bab III, bagian pertama, Pasal 5, dalam menjalankan aktivitasnya koperasi melaksanakan prinsip koperasi yaitu sebagai berikut:

a. Keanggotaan bersifat bersifat sukarela dan terbuka.
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

e. Kemandirian.

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

a. Pendidikan perkoperasian.

b. Kerjasama antar koperasi.

2.2.6 Bentuk dan Jenis Koperasi

Dalam Undang-undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992, bab IV, bagian pertama, Pasal 15, koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder.

1. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang.
2. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi.

Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

Jenis koperasi menurut sifat usahanya:

1. Koperasi Konsumen (Koperasi Konsumsi)

   Koperasi yang melakukan kegiatan usahanya dalam menyediakan barang-barang ekonomi untuk konsumen atau anggota. Koperasi konsumsi bertujuan menyediakan barang-barang dengan harga layak dan kualitas yang baik.

2. Koperasi Produsen (Koperasi produksi)

Koperasi yang melakukan kegiatan usahanya dengan memproduksi sendiri barang-barang yang akan dipasarkan.

3. Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi Kredit)

   Koperasi yang melakukan kegiatan usahanya dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan mudah dan bunga yang ringan.

4. Koperasi Jasa

   Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya dalam bidang jasa.

5. Koperasi Pemasaran (Koperasi Serba Usaha)

   Koperasi yang mengelola berbagai macam usaha, misalnya di bidang produksi, konsumsi, perkreditan dan jasa.

Jenis koperasi juga dapat dibedakan menurut komoditas atau barang yang ditangani, misalnya koperasi karet, koperasi cengkeh, koperasi kedelai dan koperasi tembakau.

Jenis koperasi yang dibedakan menurut lapangan usahanya, misalnya koperasi perumahan, koperasi pertanian dan koperasi angkutan.

Jenis koperasi yang dibedakan menurut wilayah kerjanya, misalnya koperasi unit desa (KUD) dan koperasi sekolah.

Jenis koperasi yang di bedakan menurut fungsional atau golongan personilnya, misalnya koperasi pemuda, koperasi pegawai negeri dan koperasi wanita.

2.2.7 Modal Koperasi

Dalam Undang-undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992, bab IV, bagian pertama, Pasal 41, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

Modal sendiri dapat berasal dari:

1. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama untuk semua anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan pokok ini ikut menanggung kerugian.
2. Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu misalnya ditarik pada waktu penjualan barang-barang atau ditarik pada waktu anggota menerima kredit dari koperasi dan sebagainya. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.
3. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
4. Hibah

Modal pinjaman dapat berasal dari:

1. Anggota

   Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

2. Koperasi lainnya dan atau anggotanya

   Pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.

3. Bank dan lembaga keuangan lainnya

   Pinjaman dari Bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya

   Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Sumber lain yang sah

   Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.